



RENJA PERUBAHAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



1E78DB25CA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1E78DB25CA>

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Karena atas berkenan-Nya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tahun 2025 dapat disusun dengan baik.

Rencana Kerja (Renja) merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara Substansi, Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 memuat hasil evaluasi Renja Triwulan I Tahun 2025, tujuan dan sasaran BKD Tahun 2025 serta rencana kerja dan pendanaan BKD tahun 2025.

Kami Ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan dokumen Renja Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, Semoga Allah SWT meridhoi kita semua.

Bandung, 22 Mei 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,
Dr. H. DEDI SUPANDI., S.STP.,M.Si.
Pembina Utama Madya



1E78DB25CA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1E78DB25CA>

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. EVALUASI RENJA BKD PROV JABAR TW I TAHUN 2025	7
2.1. Evaluasi RENJA BKD Prov Jabar sampai dengan TW I Tahun 2025	7
2.2. Analisis Kinerja Layanan BKD Prov Jabar.	18
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD	19
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.	28
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.	33
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH BKD PROV JABAR	34
3.1 Program dan Kegiatan BKD Prov Jabar Tahun 2025	34
3.2 Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKD Prov Jabar Tahun 2025	45
BAB IV. PENUTUP	48
Lampiran-Lampiran	



1E78DB25CA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1E78DB25CA>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun, yang memuat program kegiatan, sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, penyusunan berpedoman kepada perubahan sasaran dan tujuan yang di monitoring dan evaluasi setiap triwulannya, dan berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat.

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib Menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang dalam pasal 15 ayat (1) mengamatkan bahwa “Perangkat Daerah Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah”

Proses Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai Pada Tahun berjalan hasil Monitoring Evaluasi Pada Triwulan I Tahun 2025, selain itu fenomena yang ada, serta isu strategis



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1E78DB25CA>

Rencana Kerja BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 telah diselaraskan dengan dokumen Renstra BKD Tahun 2024-2026 yang telah dirubah pada Tahun 2025 dan akan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan BKD Provinsi Jawa Barat tahun 2025 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran pembanguna dan penelahaan terhadap Kebijakan Nasional.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Dokumen digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1E78DB25CA>



5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-undang No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, dan Inventarisasi Kalsifikasi, Kodefikasi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1E78DB25CA>

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237);
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 78 Seri E);
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat;
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
21. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2026;
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD Provinsi Jawa Barat);
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024;



25. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 103/Kep.Keputusan/2024 tentang Tata Cara Penggunaan Perangkat Elektronik yang dikeluarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1E78DB25CA>

Kep.1495/PW.03/Sekre/2024 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024-2026.

26. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor Kep.508/PR.03/Sekre/2025 tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 disusun untuk mewujudkan target kinerja Tahun 2025 dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki.

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah ke dalam Rencana Aksi Tahunan;
- Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan dan tugas Badan Kepegawaian.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini dijabarkan penjelasan ringkas tentang RENJA Perangkat Daerah, keterkaitan antara RENJA dengan RKPD serta RENSTRA perangkat daerah, serta proses penyusunan RENJA Perubahan.

BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TW I TAHUN 2025

Bab ini berisi hasil evaluasi pelaksanaan RENJA BKD Provinsi Jawa Barat TW I Tahun 2025, analisis kinerja pelayanan BKD Provinsi Jawa Barat, dan isu-isu penting

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1E78DB25CA>



1E78DB25CA

penyelenggaraan tugas dan fungsi BKD Provinsi Jawa Barat.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Perubahan BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

BAB IV : PENUTUP

Bab ini uraian penutup yang terdiri atas catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.



1E78DB25CA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1E78DB25CA>

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025

Evaluasi atau reviu Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 dilakukan terhadap realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan BKD Provinsi Jawa Barat. Serta realisasi pada Triwulan I Tahun 2025 yang dapat di lihat pada Tabel Capaian Kinerja 2.2.

Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 di selaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024-2026 dan Cascading RENJA Perubahan Tahun 2025.

2.1 Evaluasi Rencana Kerja BKD Provinsi Jawa Barat (s.d Triwulan I Tahun 2025).

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Triwulan I Tahun 2025 telah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) secara optimal dan terukur dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah di tetapkan. Pada Tahun 2025, BKD Provinsi Jawa Barat mempunyai 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan dengan alokasi anggaran menjadi Rp. 66.254.500.375,- sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat 2025.

Hasil evaluasi terhadap capaian pelaksanaan Program Kepegawaian dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sampai dengan Triwulan I tahun 2025 telah mencapai realisasi anggaran 16.139.453.522,- dengan persentase 24,36 % dari pagu anggaran perubahan sebesar Rp.66.254.500.375,- dengan sisa Anggaran Rp.50.115.046.853,- dengan realisasi Fisik adalah 15.97 %, Adapun rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program sehingga predikat kinerja yang dicapai untuk Tahun 2025 adalah **“Sangat Rendah”**.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1E78DB25CA>

Tabel 2.1 Matrik Evaluasi Hasil Rencana Kerja BKD Prov Jawa Barat s.d Triwulan I Tahun 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2025 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2025(%)		Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab	Ketera ngan	
										I				II													III
				Kinerja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja			Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
1	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			Rp 66.254.500.375		Rp -		Rp 66.254.500.375		Rp 16.139.453.522		Rp -		Rp -		Rp -		Rp 16.139.453.522		24, 36		Rp 161.394.535	0	0, 24		
	5.03	KEPEGAWAIAN			Rp 66.254.500.375		Rp -		Rp 66.254.500.375		Rp 16.139.453.522		Rp -		Rp -		Rp -		Rp 16.139.453.522		24, 36		Rp 161.394.535	0	0, 24		
	5.03.0.00.0.00. 01.0000	Badan Kepegawaian Daerah			Rp 66.254.500.375		Rp -		Rp 66.254.500.375		Rp 16.139.453.522		Rp -		Rp -		Rp -		Rp 16.139.453.522		24, 36		Rp 161.394.535	0	0, 24		
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai RB General Perangkat Daerah	KATEG ORI	Rp 56.492.536.584		Rp -	A	Rp 56.492.536.584		Rp 14.465.548.508		Rp -		Rp -		Rp -		Rp 14.465.548.508		25, 61		Rp 144.655.485	0,00	0, 00	Badan Kepega waian Daerah	
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LAPOR AN	Rp 170.338.475		Rp -	4	Rp 170.338.475	0	Rp 33.920.500		Rp -		Rp -		Rp -	0	Rp 33.920.500	0,00	19, 91		Rp 339.205	0,00	0, 00	Badan Kepega waian Daerah	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DOKU MEN				10		3							3	30,0 0			0,00		0,00		Badan Kepega waian Daerah		
	5.03.01.1.01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DOKU MEN	Rp 125.837.000		Rp -	10	Rp 125.837.000	3	Rp 33.920.500		Rp -		Rp -		Rp -	3	Rp 33.920.500	30,0 0	26, 96		Rp 339.205	0,00	0, 00	Badan Kepega waian Daerah	
	5.03.01.1.01.0 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LAPOR AN	Rp 44.501.475		Rp -	4	Rp 44.501.475	1	Rp -		Rp -		Rp -		Rp -	1	Rp -	25,0 0	0,0 0		Rp -	0,00	0, 00	Badan Kepega waian Daerah	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan(%)																				27,5 0	13, 48			0,00	0, 00		
Predikat Kinerja																				SR	SR			SR	SR		
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	LAPOR AN	Rp 47.416.908.475		Rp -	15	Rp 47.416.908.475	3	Rp 12.220.307.151		Rp -		Rp -		Rp -	3	Rp 12.220.307.151	20,0 0	25, 77		Rp 122.203.072	0,00	0, 00	Badan Kepega waian Daerah	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ORAN G/ BULAN				140		140							140	100, 00			0,00		0,00		Badan Kepega waian Daerah		
	5.03.01.1.02.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ORAN G/ BULAN	Rp 47.283.848.475		Rp -	140	Rp 47.283.848.475	140	Rp 12.207.095.901		Rp -		Rp -		Rp -	140	Rp 12.207.095.901	100, 00	25, 82		Rp 122.070.959	0,00	0, 00	Badan Kepega	
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE-E) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital																											

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1E78DB25CA>



1E78DB25CA

No	Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2025 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2025(%)		Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab	Ketera ngan	
										I		II		III		IV												
				Kinerja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.			Kine rja
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17	
																									waian Daerah			
	5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Sem esteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD		LAPORAN	Rp 133.060.000		Rp -	15	Rp 133.060.000	3	Rp 13.211.250		Rp -		Rp -		Rp -	3	Rp 13.211.250	20,00	9,93		Rp 132.113	0,00	0,00	Badan Kepega waian Daerah	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan(%)																					60,00	17,87			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																					R	SR			SR	SR		
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		ORANG	Rp 24.050.000		Rp -	25	Rp 24.050.000	0	Rp -		Rp -		Rp -		Rp -	0	Rp -	0,00	0,00		Rp -	0,00	0,00	Badan Kepega waian Daerah	
	5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		ORANG	Rp 24.050.000		Rp -	25	Rp 24.050.000	0	Rp -		Rp -		Rp -		Rp -	0	Rp -	0,00	0,00		Rp -	0,00	0,00	Badan Kepega waian Daerah	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan(%)																					0,00	0,00			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																					SR	SR			SR	SR		
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		LAPORAN	Rp 1.412.475.415		Rp -	12	Rp 1.412.475.415	3	Rp 226.519.904		Rp -		Rp -		Rp -	3	Rp 226.519.904	25,00	16,04		Rp 2.265.199	0,00	0,00	Badan Kepega waian Daerah	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		LAPORAN			12	3						3		25,00		0,00	Badan Kepega waian Daerah									
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		PAKET			20	3						3		15,00		0,00	Badan Kepega waian Daerah									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		PAKET			12	3						3		25,00		0,00	Badan Kepega waian Daerah									
	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		PAKET	Rp 334.543.021		Rp -	20	Rp 334.543.021	3	Rp 53.252.904		Rp -		Rp -		Rp -	3	Rp 53.252.904	15,00	15,92		Rp 532.529	0,00	0,00	Badan Kepega waian Daerah	
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		PAKET	Rp 216.310.855		Rp -	12	Rp 216.310.855	3	Rp 70.233.000		Rp -		Rp -		Rp -	3	Rp 70.233.000	25,00	32,47		Rp 702.330	0,00	0,00	Badan Kepega waian Daerah	
	5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		LAPORAN	Rp 245.000.000		Rp -	12	Rp 245.000.000	3	Rp 46.400.000		Rp -		Rp -		Rp -	3	Rp 46.400.000	25,00	18,94		Rp 464.000	0,00	0,00	Badan Kepega waian Daerah	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi		LAPORAN	Rp 516.624.529		Rp -	12	Rp 516.624.529	3	Rp 56.624.000		Rp -		Rp -		Rp -	3	Rp 56.624.000	25,00	9,18		Rp 466.340	0,00	0,00	Badan Kepega	



1E78DB25CA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1E78DB25CA>

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2025 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2025(%)		Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab	Ketera ngan	
										I	II	III	IV															
				Kinerja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.			Kine rja
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17	
		dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																							waian Daerah		
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan(%)																			22,5 0	19, 13			0,00	0, 00				
Predikat Kinerja																			SR	SR			SR	SR				
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		UNIT	Rp 662.189.553		Rp -	20	Rp 662.189.553	3	Rp 122.131.995		Rp -		Rp -		Rp -	3	Rp 122.131.995	15,0 0	18, 44		Rp 1.221.320	0,00	0, 00	Badan Kepega waian Daerah	
	5.03.01.1.07.0 011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		UNIT	Rp 662.189.553		Rp -	20	Rp 662.189.553	0	Rp 122.131.995		Rp -		Rp -		Rp -	0	Rp 122.131.995	0,00	18, 44		Rp 1.221.320	0,00	0, 00	Badan Kepega waian Daerah	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan(%)																			0,00	18, 44			0,00	0, 00				
Predikat Kinerja																			SR	SR			SR	SR				
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		LAPOR AN	Rp 5.196.215.855		Rp -	12	Rp 5.196.215.855	3	Rp 1.170.542.899		Rp -		Rp -		Rp -	3	Rp 1.170.542.899	25,0 0	22, 53		Rp 11.705.429	0,00	0, 00	Badan Kepega waian Daerah	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		LAPOR AN				12		3							3		25,0 0				0,00		Badan Kepega waian Daerah		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		LAPOR AN				12		3							3		25,0 0				0,00		Badan Kepega waian Daerah		
	5.03.01.1.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		LAPOR AN	Rp 506.396.816		Rp -	12	Rp 506.396.816	3	Rp 113.386.245		Rp -		Rp -		Rp -	3	Rp 113.386.245	25,0 0	22, 39		Rp 1.133.862	0,00	0, 00	Badan Kepega waian Daerah	
	5.03.01.1.08.0 003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		LAPOR AN	Rp 103.560.000		Rp -	12	Rp 103.560.000	3	Rp 8.375.000		Rp -		Rp -		Rp -	3	Rp 8.375.000	25,0 0	8,0 9		Rp 83.750	0,00	0, 00	Badan Kepega waian Daerah	
	5.03.01.1.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		LAPOR AN	Rp 4.586.259.039		Rp -	12	Rp 4.586.259.039	3	Rp 1.048.781.654		Rp -		Rp -		Rp -	3	Rp 1.048.781.654	25,0 0	22, 87		Rp 10.487.817	0,00	0, 00	Badan Kepega waian Daerah	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan(%)																			25,0 0	17, 78			0,00	0, 00				
Predikat Kinerja																			SR	SR			SR	SR				
		Pemeliharaan Barang Milik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional		UNIT	Rp 1.510.358.811		Rp -	43	Rp 1.510.358.811	12	Rp 592.126.059		Rp -		Rp -		Rp -	12	Rp 592.126.059	27,9 0	42, 98		Rp 6.921.261	0,00	0, 00	Badan Kepega	



1E78DB25CA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1E78DB25CA>

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2025 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2025(%)		Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab	Ketera ngan	
										I		II		III		IV												
				Kinerja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17	
		Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya																							waian Daerah		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi		UNIT				12		3								3		25,0 0				0,00		Badan Kepega waian Daerah	
	5.03.01.1.09.0 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		UNIT	Rp 668.580.000		Rp -	43	Rp 668.580.000	12	Rp 159.228.700		Rp -		Rp -		Rp -	12	Rp 159.228.700	27,9 1	23, 82		Rp 1.592.287	0,00	0, 00	Badan Kepega waian Daerah	
	5.03.01.1.09.0 011	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi		UNIT	Rp 941.778.811		Rp -	12	Rp 941.778.811	3	Rp 532.897.359		Rp -		Rp -		Rp -	3	Rp 532.897.359	25,0 0	56, 58		Rp 5.328.974	0,00	0, 01	Badan Kepega waian Daerah	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan(%)																				26,4 5	40, 20			0,00	0, 00			
Predikat Kinerja																				SR	SR			SR	SR			
Rata-Rata Capaian Kinerja Program(%)																				23,0 6	20, 81			0,00	0, 00			
Predikat Kinerja																				SR	SR			SR	SR			
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Kriteria Pengembangan Karier	POIN	Rp 9.761.963.791		Rp -	120	Rp 9.761.963.791		Rp 1.673.905.014		Rp -		Rp -		Rp -		Rp 1.673.905.014		17, 15		Rp 16.739.050	0,00	0, 00	Badan Kepega waian Daerah		
			Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Perlindungan, Pelayanan, dan Sistem Informasi Kepegawaian	POIN				117, 5																		0,00	Badan Kepega waian Daerah	
			Nilai Kriteria Promosi dan Mutasi	POIN				40																		0,00	Badan Kepega waian Daerah	
			Nilai Kriteria Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	POIN				120																		0,00	Badan Kepega waian Daerah	
			Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja	POIN				28																		0,00	Badan Kepega	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1E78DB25CA>

N o	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2025 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2025(%)		Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab	Ketera ngan
										I		II		III		IV											
				Kinerja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
			Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi	POIN				13																0,00		Badan Kepega waian Daerah	
			Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Disiplin	POIN				4,99																0,00		Badan Kepega waian Daerah	
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	DOKU MEN	Rp 3.719.394.776		Rp -	1	Rp 3.719.394.776	0	Rp 1.021.271.666		Rp -		Rp -		Rp -	0	Rp 1.021.271.666	0,00	27, 46		Rp 10.212.717	0,00	0, 00	Badan Kepega waian Daerah	
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	DOKU MEN				4		1								1		25,0 0			0,00		Badan Kepega waian Daerah		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	LEMBA GA				3		0								0		0,00			0,00		Badan Kepega waian Daerah		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	DOKU MEN				1		0								0		0,00			0,00		Badan Kepega waian Daerah		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	DOKU MEN				1		0								0		0,00			0,00		Badan Kepega waian Daerah		
	5.03.02.1.01.0 003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	DOKU MEN	Rp 1.309.034.000		Rp -	1	Rp 1.309.034.000	0	Rp 156.887.000		Rp -		Rp -		Rp -	0	Rp 156.887.000	0,00	11, 98		Rp 1.568.870	0,00	0, 00	Badan Kepega waian Daerah	
	5.03.02.1.01.0 006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	DOKU MEN	Rp 145.594.000		Rp -	4	Rp 145.594.000	1	Rp 45.151.000		Rp -		Rp -		Rp -	1	Rp 45.151.000	25,0 0	31, 01		Rp 451.510	0,00	0, 00	Badan Kepega waian Daerah	
	5.03.02.1.01.0 008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	LEMBA GA	Rp 145.776.776		Rp -	3	Rp 145.776.776	1	Rp 51.169.000		Rp -		Rp -		Rp -	1	Rp 51.169.000	33,3 3	35, 10		Rp 511.690	0,00	0, 00	Badan Kepega waian Daerah	
	5.03.02.1.01.0 010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	DOKU MEN	Rp 2.100.090.000		Rp -	1	Rp 2.100.090.000	0	Rp 765.113.666		Rp -		Rp -		Rp -	0	Rp 765.113.666	0,00	36, 43		Rp 7.651.137	0,00	0, 00	Badan Kepega waian Daerah	
	5.03.02.1.01.0 011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	DOKU MEN	Rp 18.900.000		Rp -	1	Rp 18.900.000	0	Rp 2.951.000		Rp -		Rp -		Rp -	0	Rp 2.951.000	0,00	15, 61		Rp 29.510	0,00	0, 00	Badan Kepega waian Daerah	



1E78DB25CA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1E78DB25CA>

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2025 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2025(%)		Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab	Ketera ngan
										I		II		III		IV											
				Kinerja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan(%)																			11,67	26,03			0,00	0,00			
Predikat Kinerja																			SR	SR			SR	SR			
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	LAPORAN	Rp 710.683.768		Rp -	2	Rp 710.683.768	0	Rp 82.015.000		Rp -		Rp -		Rp -	0	Rp 82.015.000	0,00	11,54		Rp 820.150	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	DOKUMEN				2		0							0		0,00				0,00		Badan Kepegawaian Daerah		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	DOKUMEN				2		0							0		0,00				0,00		Badan Kepegawaian Daerah		
	5.03.02.1.02.001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	DOKUMEN	Rp 240.278.412		Rp -	2	Rp 240.278.412	0	Rp 26.334.000		Rp -		Rp -		Rp -	0	Rp 26.334.000	0,00	10,96		Rp 263.340	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.02.1.02.002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	LAPORAN	Rp 241.654.356		Rp -	2	Rp 241.654.356	0	Rp 25.337.000		Rp -		Rp -		Rp -	0	Rp 25.337.000	0,00	10,48		Rp 253.370	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.02.1.02.003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	DOKUMEN	Rp 228.751.000		Rp -	2	Rp 228.751.000	0	Rp 30.344.000		Rp -		Rp -		Rp -	0	Rp 30.344.000	0,00	13,27		Rp 303.440	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan(%)																			0,00	11,57			0,00	0,00			
Predikat Kinerja																			SR	SR			SR	SR			
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	DOKUMEN	Rp 4.192.772.489		Rp -	12	Rp 4.192.772.489	3	Rp 486.942.100		Rp -		Rp -		Rp -	3	Rp 486.942.100	25,00	11,61		Rp 4.869.421	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah	
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	LAPORAN				2		0							0		0,00				0,00		Badan Kepegawaian Daerah		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	DOKUMEN				4		1							1		25,00				0,00		Badan Kepegawaian Daerah		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	DOKUMEN				4		1							1		25,00				0,00		Badan Kepegawaian Daerah		



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Serifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1E78DB25CA>

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2025 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2025(%)		Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab	Ketera ngan
										I		II		III		IV											
				Kinerja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	DOKU MEN			12		3								3		25,0 0				0,00		Badan Kepega waian Daerah		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	LAPOR AN			2		0								0		0,00				0,00		Badan Kepega waian Daerah		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	ORAN G			50		0								0		0,00				0,00		Badan Kepega waian Daerah		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	ORAN G			50		0								0		0,00				0,00		Badan Kepega waian Daerah		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	DOKU MEN			4		1								1		25,0 0				0,00		Badan Kepega waian Daerah		
			Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	ORAN G			200 0		0								0		0,00				0,00		Badan Kepega waian Daerah		
	5.03.02.1.03.0 002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	DOKU MEN	Rp 221.515.000		Rp -	12	Rp 221.515.000	3	Rp 32.561.100		Rp -		Rp -		Rp -	3	Rp 32.561.100	25,0 0	14, 70		Rp 325.611	0,00	0, 00	Badan Kepega waian Daerah	
	5.03.02.1.03.0 004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	DOKU MEN	Rp 3.248.675.740		Rp -	4	Rp 3.248.675.740	0	Rp 450.000.000		Rp -		Rp -		Rp -	0	Rp 450.000.000	0,00	13, 85		Rp 4.500.000	0,00	0, 00	Badan Kepega waian Daerah	
	5.03.02.1.03.0 005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	DOKU MEN	Rp 47.774.000		Rp -	4	Rp 47.774.000	0	Rp 4.381.000		Rp -		Rp -		Rp -	0	Rp 4.381.000	0,00	9,1 7		Rp 43.810	0,00	0, 00	Badan Kepega waian Daerah	
	5.03.02.1.03.0 006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	ORAN G	Rp 151.359.270		Rp -	50	Rp 151.359.270	0	Rp -		Rp -		Rp -		Rp -	0	Rp -	0,00	0,0 0		Rp -	0,00	0, 00	Badan Kepega waian Daerah	
	5.03.02.1.03.0 009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	DOKU MEN	Rp 100.948.074		Rp -	4	Rp 100.948.074	1	Rp -		Rp -		Rp -		Rp -	1	Rp -	25,0 0	0,0 0		Rp -	0,00	0, 00	Badan Kepega waian Daerah	
	5.03.02.1.03.0 010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	ORAN G	Rp 183.407.400		Rp -	50	Rp 183.407.400	20	Rp -		Rp -		Rp -		Rp -	20	Rp -	40,0 0	0,0 0		Rp -	0,00	0, 00	Badan Kepega waian Daerah	
	5.03.02.1.03.0 012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	LAPOR AN	Rp 16.914.000		Rp -	2	Rp 16.914.000	0	Rp -		Rp -		Rp -		Rp -	0	Rp -	0,00	0,0 0		Rp -	0,00	0, 00	Badan Kepega waian Daerah	
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital																											

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1E78DB25CA>



1E78DB25CA

No	Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2025 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2025(%)		Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab	Ketera ngan	
										I		II		III		IV												
				Kinerja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.			Kine rja
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17	
	5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina		ORANG	Rp 17.900.000		Rp -	2000	Rp 17.900.000	0	Rp -		Rp -		Rp -		Rp -	0	Rp -	0,00	0,00		Rp -	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		DOKUMEN	Rp 195.709.005		Rp -	12	Rp 195.709.005	3	Rp -		Rp -		Rp -		Rp -	3	Rp -	25,00	0,00		Rp -	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.02.1.03.0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional		LAPORAN	Rp 8.570.000		Rp -	2	Rp 8.570.000	0	Rp -		Rp -		Rp -		Rp -	0	Rp -	0,00	0,00		Rp -	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan(%)																					11,50	3,77			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																					SR	SR			SR	SR		
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		DOKUMEN	Rp 1.139.112.758		Rp -	5	Rp 1.139.112.758	0	Rp 83.676.248		Rp -		Rp -		Rp -	0	Rp 83.676.248	0,00	7,35		Rp 836.762	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah	
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani		DOKUMEN				4		1							1		25,00				0,00		Badan Kepegawaian Daerah		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		ORANG				12		0							0		0,00				0,00		Badan Kepegawaian Daerah		
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa		ORANG				5000		1200							1200		24,00				0,00		Badan Kepegawaian Daerah		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		ORANG				50000		12000							12000		24,00				0,00		Badan Kepegawaian Daerah		
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		DOKUMEN	Rp 346.769.300		Rp -	5	Rp 346.769.300	1	Rp 10.810.000		Rp -		Rp -		Rp -	1	Rp 10.810.000	20,00	3,12		Rp 108.100	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		ORANG	Rp 631.276.265		Rp -	12	Rp 631.276.265	0	Rp 53.598.248		Rp -		Rp -		Rp -	0	Rp 53.598.248	0,00	8,49		Rp 535.982	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa		ORANG	Rp 48.636.000		Rp -	5000	Rp 48.636.000	0	Rp -		Rp -		Rp -		Rp -	0	Rp -	0,00	0,00		Rp -	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		ORANG	Rp 102.709.550		Rp -	50000	Rp 102.709.550	8271	Rp 19.268.000		Rp -		Rp -		Rp -	8271	Rp 19.268.000	16,54	18,76		Rp 192.680	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.02.1.04.0009	Pelayanan Proses Izin	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani		DOKUMEN	Rp 9.721.643		Rp -	4	Rp 9.721.643	1	Rp -		Rp -		Rp -		Rp -	1	Rp -	25,00	0,00		Rp -	0,00	0,00	Badan Kepega	



1E78DB25CA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1E78DB25CA>

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2025 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2025(%)		Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab	Ketera ngan
										I		II		III		IV											
								Kinerja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
		Perceraian Pegawai																								waian Daerah	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan(%)																			12,3 1	6,0 7			0,00	0, 00			
Predikat Kinerja																			SR	SR			SR	SR			
Rata-Rata Capaian Kinerja Program(%)																			8,87	14, 49			0,00	0, 00			
Predikat Kinerja																			SR	SR			SR	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			15,9 7	17, 65			0,00	0, 00			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			SR	SR			SR	SR			



1E78DB25CA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1E78DB25CA>

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 berkinerja sangat rendah terdapat faktor hambatan dan isu pencapaian kinerja, yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan BKD adalah kegiatan yang merupakan lanjutan dari program/kegiatan tahun sebelumnya, sehingga kendala yang akan dihadapi tidak akan terlalu berarti.
2. Menunggu jadwal diklat/ pembinaan dari Pembina jabatan Fungsional yang tidak selaras dengan jadwal oleh bkd buat, dan perlu disesuaikan.
3. Penetapan indikator kinerja sub kegiatan yang kurang tepat sehingga kinerja menjadi sulit terukur secara jelas.
4. Terdapat keterlambatan SPJ karena belum lengkapnya dokumen pendukung SPJ.
5. Adanya efisiensi anggaran yang mengakibatkan perubahan rencana kerja untuk disesuaikan dengan program yang akan berjalan.
6. Adanya perubahan regulasi dan kebijakan pimpinan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi Perubahan Rencana Kerja (RENJA) BKD Provinsi Jawa Barat Triwulan I tahun 2025, Pencapaian Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 di peroleh sebesar 24,36 %, Dengan kategori Sangat Rendah Sehingga menjadi perhatian untuk di lakukan perbaikan kedepan dalam meningkatkan Kinerja.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dengan Bappeda serta Bidang di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Semester I Tahun 2025, adanya perubahan Target serta Indikator pada di lihat pada Tabel di bawah ini :

TABEL 2.2
Perubahan Target Indikator Kinerja Utama
Tahun 2025

No	Program	IKU	Satuan Target		Alasan Perubahan	Penanggung Jawab
			Semula	Menjadi		
1	Kepegawaian	Indeks Sistem Merit	397.5	400	Sudah dilakukan Penilaian oleh KASN pada 2024 berlaku 2 tahun kedepan	MP
2	Kepegawaian	Indeks Profesionalitas ASN	45.99	53.61	Target IP ASN Pada Penilaian 2024 sudah tercapai diatas 100 %	PPIK



1E78DB25CA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1E78DB25CA>

2.2 Analisis Kinerja Layanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, memiliki tugas, pokok dan fungsi melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, meliputi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
2. Penyelenggaraan perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
3. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis badan;
4. Penyelenggaraan administrasi Badan;
5. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
6. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kinerja pelayanan Urusan Kepegawaian oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat pada periode sebelumnya (tahun 2019-2023) ditetapkan dengan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama dalam Perencanaan Strategis BKD periode Tahun 2024-2026 mengalami beberapa kali perubahan karena target kinerja indikator telah tercapai dan perlu reviu untuk menentukan kembali indikator kinerjanya. Capaian kinerja selama periode 2019-2024 tersaji dalam tabel berikut ini :



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1E78DB25CA>

**Tabel. 2.3 Pencapaian Kinerja Layanan
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET			Realisasi Capaian		Proyeksi		Analisis Catatan
				2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Sistem Merit	-	-				396,5	400	400	402,5	-
2	Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kualifikasi, Kinerja, Disiplin)	-	-				-	53,8	53,61	53,68	-

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat apabila di sandingkan dengan capaian yang telah di targetkan baik program, dan kegiatan BKD telah mencapai target yang telah di tetapkan. Walaupun masih adanya kurang cermattan perencanaan saat menentukan kegiatan yang akan dilakukan baik secara waktu kegiatan maupun perhitungan saat menganggarkan.hal ini terjadi karena tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan pedoman penyusunan Renja.

Permasalahan dan hambatan yang di hadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BKD, yaitu antara lain :



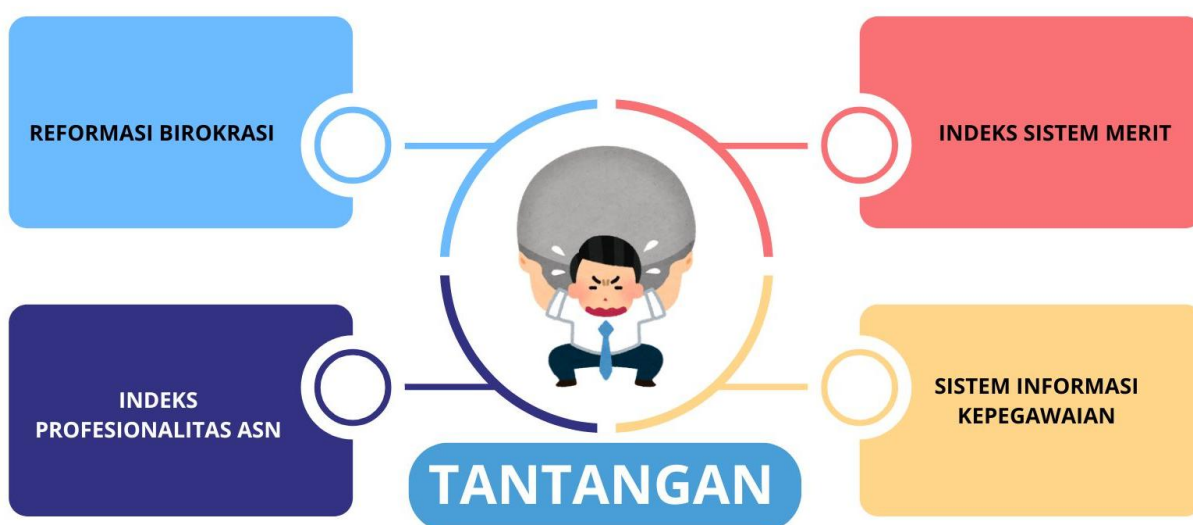
1E78DB25CA

Gambar 2.4
Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Isu Strategis



Isu dan masalah strategis yang menjadi perhatian utama pada tahun 2025 merupakan hasil dari evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan tugas pokok fungsi Badan Kepegawaian Daerah serta permasalahan yang timbul pada tahun-tahun sebelumnya.

Gambar 2.5
Tantangan Pengembangan Manajemen ASN BKD Provinsi Jawa Barat



1E78DB25CA

A. Tantangan

Tantangan (Threat) bagi organisasi adalah faktor lingkungan (baik internal maupun eksternal) yang tidak menguntungkan dan berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan gambar 2.5 ini dijabarkan tantangan pengembangan pelayanan kepegawaian sebagai berikut :

1. **Sistem Informasi Layanan Kepegawaian** integrasi data SIASN BKN dengan Aplikasi Data Kepegawaian SIAP Jabar, kondisi existing saat ini dalam sistem informasi kepegawaian masih kesulitan menerapkan otentikasi dan parameter yang digunakan oleh API SIASN BKN agar komunikasi data kepegawaian dapat bersifat 2 (dua) arah (duplex), selain itu keamanan data pegawai merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dimana data yang disimpan dalam SIAP Jabar harus dijaga keamanannya agar tidak disalahgunakan atau dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, belakangan ini sering terjadi pemberitaan kebocoran data yang disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hasil audit internal yang diadakan tim SANDIKAMI Diskominfo Provinsi Jawa Barat keamanan data di SIAP Jabar masih belum layak. Sejalan dengan hal tersebut sebagai percepatan sistem informasi layanan kepegawaian percepatan dan peningkatannya integrasi SIAP Jabar dan SIASN merupakan isu strategis dimana untuk peningkatan pelayanan kepegawaian khususnya kenaikan pangkat setiap usulan kenaikan pangkat pegawai Provinsi Jawa Barat kurang lebih berjumlah 4000an setiap tahunnya, dan setiap periode Badan Kepegawaian Negara memberikan batas waktu pengusulan kenaikan pangkat yang pada akhirnya tim pangkat melakukan percepatan usulan kenaikan pangkat agar seluruh usulan pegawai provinsi dapat terusulkan seluruhnya dapat diterbitkan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkatnya tepat waktu dan tepat gaji, namun pada prosesnya terdapat kendala yang berakibat menghambat pengusulan kenaikan pangkat, diantaranya :
 - keterlambatan pengusulan dari perangkat daerah;
 - persyaratan kenaikan pangkat yang belum memenuhi syarat.
2. **Meningkatkan Merit System** dan pola karir memberi kesempatan bagi PNS untuk menduduki jabatan berdasarkan potensi, kompetensi, dan kinerja.

dengan telah terbentuk dan berjalannya pola manajemen talenta dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1E78DB25CA>



manajemen ASN di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan dipayungi beberapa regulasi yang mengatur tentang masing-masing urusan pada setiap unsur manajemen talenta yang sudah ditetapkan baru melalui peraturan kepala daerah yang secara keberlangsungan, pengembangan dan penguatan payung/dasar hukum masih belum dinaungi aturan daerah yang lebih tinggi.;

3. **Reformasi Birokrasi Tematik** yang berimbas kepada Transformasi Birokrasi yang berimbas dan berdampak pada penyederhanaan Nomenklatur jabatan pelaksanaan (Keputusan Menteri (Kepmen) PANRB No. 182/2024) dan Peningkatan Indeks *Core Value* berAKHLAK. untuk mendukung transformasi birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional di lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan kebijakan terkait dengan nomenklatur jabatan pelaksana menggantikan kebijakan lama yang dinilai sudah tidak relevan dan selaras dengan struktur yang baru sejalan dengan hal tersebut *Core Value* berAKHLAK;
4. **Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN** menuntut Peningkatan IP ASN sangat penting karena dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong efektivitas dan efisiensi pemerintahan, serta mengurangi potensi korupsi. ;

B. Peluang

Analisis terhadap lingkungan eksternal dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung Manajemen ASN yang dilaksanakan oleh BKD Provinsi Jawa Barat dalam masa transisi kepala daerah. Adapun peluang kedepan dalam Manajemen ASN adalah sebagai berikut.



Gambar 2.6**Peluang Pengembangan Manajemen ASN BKD Provinsi Jawa Barat****1. Transformasi Digital**

Transformasi digital Pemerintahan merupakan upaya untuk mengembangkan implementasi layanan *E-Government* dengan menggunakan Teknologi Informasi. Peningkatan pelayanan publik dan peningkatan manajemen ASN sejatinya berjalan dengan sistem online agar dalam pelaksanaan evaluasi dan monitor dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran.

Sejalan dengan hal tersebut sistem informasi layanan kepegawaian merupakan hal utama yang menjadi pembangunan dan pembenahan dalam transformasi digital, dimana data data kepegawain harus sudah terintegrasi antara SIAP Jabar dan SIAN BKN, hal ini bertujuan untuk memudahkan pemantauan dan peningkatan pelayanan kepegawaian sehingga seluruh layanan kepegawaian di Provinsi Jawa Barat dan ditingkatkan sebagai upaya percepatan layanan kepegawaian.

Dalam peningkatan manajemen ASN tranformasi digital merupakan indikator utama penerapan sistem merit dimana di era Industri 4.0 dalam Manajemen ASN sudah harus menggunakan Aplikasi yang menunjang dalam pelaksanaan Manajemen ASN. Aplikasi tersebut akan mempermudah dalam proses manajemen dalam Mutasi dan Promosi, pengembangan Pola Karir PNS melalui Fit And Proper

agar Profil Kompetensi Teknis pegawai sebagai dasar penyelenggaraan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1E78DB25CA>



1E78DB25CA

pengembangan Kompetensi yang lebih efektif.

Untuk pemenuhan Indeks Profesionalitas ASN bantuan Transformasi Digital di bidang Peningkatan Kompetensi ASN dapat memudahkan dalam pembelajaran ASN untuk mendapatkan Pengembangan Kompetensi Minimal 24 JP dalam 1 (satu) tahun dengan membuat modul pembelajaran yang dibuat secara online agar tugas dan fungsi PNS masih bisa tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Reformasi Birokrasi Transformasi Digital merupakan komponen penunjang utama dalam melakukan perubahan dalam sektor vital pemerintahan yang dapat membantu dalam pengukuran indeks kenaikannya, sehingga target yang di inginkan dapat tercapai dengan baik.

2. Manajemen ASN berdasarkan PermenPAN & RB Nomor 3 Tahun 2020

Manajemen Talenta ASN Nasional adalah sistem manajemen karier ASN yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah secara nasional dalam rangka akselerasi pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya Manajemen ASN bertujuan membuat alur pengembangan Karir ASN yang mengacu kepada Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis dan Kompetensi Sosiokultural.

Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN diharapkan dapat meningkatkan kualitas Manajemen ASN sehingga dalam tahapan akuisisi, pengembangan, retensi dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan instansi pusat dan instansi daerah.

Pencapaian hasil sistem merit pemerintah provinsi Jawa Barat tahun 2022 lalu menunjukkan bahwa penerapan manajemen talenta ASN di Jawa Barat telah berjalan sebagaimana mestinya, dengan pembangunan *Assesment Center* diharapkan peningkatan kompetensi ASN di pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Jawa Barat.



3. Akuisisi Talenta / Talent Scouting

Proses mutasi ini merupakan salah satu strategi manajemen PNS yang dapat dijadikan salah satu opsi untuk pengembangan karier, pengembangan kompetensi bagi PNS Lingkungan Provinsi Jawa Barat, selain beberapa pertimbangan lainnya secara individual dan personal dari PNS yang bersangkutan.

Setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mutasi Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, maka pelaksanaan mutasi pegawai di lingkungan Provinsi Jawa Barat menyesuaikan dengan kaidah sistem merit yang menjadikan kompetensi, kualifikasi dan kinerja sebagai indikator utama manajemen talenta pegawai.

4. Permenpan RB No 6 tahun 2022

Pengelolaan kinerja Pegawai merupakan suatu instrumen untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pemerintah. Selain itu, pengelolaan kinerja Pegawai juga bertujuan untuk memberikan motivasi kepada Pegawai dalam rangka meningkatkan kinerjanya secara lebih optimal dengan memaksimalkan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan sehingga pada akhirnya hasil pengelolaan kinerja Pegawai tersebut dapat digunakan sebagai dasar penentuan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Pegawai yang tepat. pengelolaan kinerja Pegawai ini merupakan satu kesatuan arah kebijakan pengelolaan kinerja individu yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan kapasitas Pegawai dengan semangat memperkuat peran pimpinan dan membangun kebersamaan dan kolaborasi antar Pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.



Dengan memperhatikan evaluasi kinerja tahun 2024, hasil Forum Perangkat Daerah bidang kepegawaian tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, maka isu strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sistem Merit

Presiden Republik Indonesia menetapkan 5 prioritas kerja nasional Tahun 2025-2029 yang salah satunya yaitu “Pembangunan SDM” untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Salah satu upaya BKD Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan sumber daya manusia yaitu dengan memperkuat implementasi manajemen ASN berbasis sistem merit. Hal tersebut tertuang sebagai Indikator dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Pada Tahun 2025 Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Barat selaku penanggungjawab Penerapan Sistem Merit di Provinsi Jawa Barat telah mengikuti penilaian Penerapan Sistem Merit yang dilaksanakan oleh KASN. Dalam penilaian tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan nilai sebesar 400 poin atau berada pada kategori IV dengan indikator berwarna biru, menunjukkan bahwa instansi dinilai “sangat baik”. Instansi dalam kategori tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar persyaratan sudah dipenuhi dan sudah dapat diizinkan untuk menjalankan seleksi terbatas di instansinya melalui talent pool dan dievaluasi setiap 2 tahun. Capaian tersebut sudah mencapai target sebesar 400 poin yang ditetapkan pada tahun 2024.

2. Komitmen Kinerja Pembangunan Progresif

Komitmen Kinerja Pembangunan Progresif salah satu aspek dalam target kepada sasaran perangkat daerah, bahwa perangkat daerah khususnya Badan Kepegawaian provinsi jawa barat diberikan tugas dalam pembangunan daerah yaitu harus bisa mengoptimalkan target di luar target yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1E78DB25CA>

3. Sistem Informasi Layanan Kepegawaian

Dalam mendukung pelaksanaan sistem merit di Provinsi Jawa Barat, diperlukan adanya digitalisasi sistem informasi layanan kepegawaian yang bertujuan agar pelayanan yang diberikan lebih cepat, efektif, efisien serta dapat menghemat anggaran yang akan dikeluarkan kemudian hari. Digitalisasi layanan kepegawaian juga membuat kinerja lebih terukur, target kinerja jelas, tunjangan adil, memudahkan pekerjaan karena terikat tempat dan waktu, merubah budaya kerja dan data yang dihasilkan akan lebih komprehensif.

Selain itu, keamanan data-data yang disimpan dalam aplikasi layanan kepegawaian masih belum optimal yang dapat menyebabkan data bisa dicuri atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

4. Reformasi Birokrasi General

Arahan Presiden tentang Reformasi Birokrasi bahwa birokrasi bukan tumpukan kertas, birokrasi harus lincah dan cepat agar berdampak dan langsung dirasakan masyarakat. Reformasi Birokrasi dalam manajemen SDM saat ini sedang beralih dari *performance based bureaucracy*, birokrasi berbasis aturan menjadi birokrasi berbasis *dynamic governance* yaitu pengembangan potensi *human capital*, ASN tak tersekat agar mampu menyesuaikan dengan perubahan yang cepat.

Dalam mendukung transformasi birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional di lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan PNS secara Fleksibel. Peraturan ini memungkinkan ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk bekerja lebih dinamis, tidak lagi terikat pada ruang fisik dan jam kerja tertentu.

5. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN bertujuan memberikan standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan penilaian profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Pada Tahun 2024, Badan



Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat mendapatkan penilaian IP ASN dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat melalui aplikasi NDE (Sistem Informasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1E78DB25CA>

sebesar 53,8 poin. Dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai tugas pokok dan fungsinya mengemban 3 dimensi diantaranya, 1) Dimensi Kualifikasi; 2) Dimensi Kinerja; dan 3) Dimensi Disiplin, sementara untuk dimensi Kompetensi menjadi tugas, pokok dan fungsi dari BPSDM.

6. Pembinaan Disiplin ASN

Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan untuk menumbuhkan sikap disiplin PNS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka PNS wajib mematuhi disiplin PNS dan setiap Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah segera melakukan proses pemetaan (*mapping*) terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program dan kegiatan dan sub kegiatan untuk kemudian dilakukan perubahan dengan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah, maka daripada itu BKD Provinsi Jawa Barat melakukan pemetaan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang berada dalam Renstra BKD 2024-2026 agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, serta berdasarkan telaahan yang telah dilakukan berikut lebih rinci hasil review terhadap Rancangan Awal RKPDP Tahun 2025 Provinsi Jawa Barat yang terlampir pada Tabel 2.4



Tabel 2.4
Review Terhadap RKPD Tahun 2024
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025			Kategori Kegiatan (Fixed Cost/Non Fixed Cost)	Alasan / Argumentasi Perubahan
						Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
5	3				KEPEGAWAIAN	73.300.845.933,00	66.254.500.375,00	69.156.097.590,00		
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	58.868.651.388,00	56.492.536.584,00	58.356.068.799,00	Fixed Cost	
5	3	1	1,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	467.648.250,00	170.338.475,00	170.338.475,00	Fixed Cost	
5	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	319.310.000,00	125.837.000,00	125.837.000,00		
5	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	148.338.250,00	44.501.475,00	44.501.475,00		
5	3	1	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48.352.216.143,00	47.416.908.475,00	49.280.440.690,00	Fixed Cost	
5	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	48.114.032.674,00	47.283.848.475,00	49.147.380.690,00		Adanya penambahan pegawai
5	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	238.183.469,00	133.060.000,00	133.060.000,00		
5	3	1	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.100.000,00	24.050.000,00	24.050.000,00	Fixed Cost	
5	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	61.100.000,00	24.050.000,00	24.050.000,00		
5	3	1	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.071.669.550,00	1.412.475.415,00	1.412.475.415,00	Fixed Cost	
5	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	403.222.050,00	334.543.021,00	334.543.021,00		



1E78DB25CA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1E78DB25CA>

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025			Kategori Kegiatan (Fixed Cost/Non Fixed Cost)	Alasan / Argumentasi Perubahan
						Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)		
5	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	258.365.500,00	216.310.855,00	216.310.855,00		
5	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	350.000.000,00	245.000.000,00	245.000.000,00		
5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.060.082.000,00	616.621.539,00	616.621.539,00		
5	3	1	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	846.408.530,00	662.189.553,00	662.189.553,00	Fixed Cost	
5	03	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	846.408.530,00	662.189.553,00	662.189.553,00		
5	3	1	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.219.815.856,00	5.196.215.855,00	5.196.215.855,00	Fixed Cost	
5	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	506.396.816,00	506.396.816,00	506.396.816,00		
5	03	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.560.000,00	103.560.000,00	103.560.000,00		
5	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.609.859.040,00	4.586.259.039,00	4.586.259.039,00		
5	3	1	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.849.793.059,00	1.610.358.811,00	1.610.358.811,00	Fixed Cost	
5	03	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	768.490.000,00	668.580.000,00	668.580.000,00		
5	03	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.081.303.059,00	941.778.811,00	941.778.811,00		
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	14.432.194.545,00	9.761.963.791,00	10.800.028.791,00		



1E78DB25CA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1E78DB25CA>

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025			Kategori Kegiatan (Fixed Cost/Non Fixed Cost)	Alasan / Argumentasi Perubahan
						Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)		
5	3	2	1,01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	7.437.909.936,00	3.719.394.776,00	4.257.459.776,00	Non Fixed Cost	
5	03	02	1.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	3.501.280.000,00	1.309.034.000,00	1.309.034.000,00		
5	03	02	1.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	347.945.725,00	145.594.000,00	145.594.000,00		
5	03	02	1.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	316.624.211,00	145.776.776,00	145.776.776,00		
5	03	02	1.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3.211.680.000,00	2.100.090.000,00	2.638.155.000,00		Tenaga Ahli Sistem Informasi Kepegawaian
5	03	02	1.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	60.380.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00		
5	3	2	1,02		Mutasi dan Promosi ASN	1.459.126.052,00	710.683.768,00	710.683.768,00	Non Fixed Cost	
5	03	02	1.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	483.074.020,00	240.278.412,00	240.278.412,00		
5	03	02	1.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	461.482.032,00	241.654.356,00	241.654.356,00		
5	03	02	1.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	514.570.000,00	228.751.000,00	228.751.000,00		
5	3	2	1,03		Pengembangan Kompetensi ASN	3.390.431.470,00	4.192.772.489,00	4.692.772.489,00	Non Fixed Cost	
5	03	02	1.03	02	Pengelolaan Assessment Center	512.815.400,00	221.515.000,00	221.515.000,00		
5	03	02	1.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1.636.062.000,00	3.248.675.740,00	3.748.675.740,00		Keurangan Beasiswa S2 MTI (ITB Lanjutan)
5	03	02	1.03	05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	117.120.000,00	47.774.000,00	47.774.000,00		
5	03	02	1.03	06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	177.450.900,00	151.359.270,00	151.359.270,00		



1E78DB25CA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1E78DB25CA>

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025			Kategori Kegiatan (Fixed Cost/Non Fixed Cost)	Alasan / Argumentasi Perubahan
						Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)		
5	03	02	1.03	09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	123.993.580,00	100.948.074,00	100.948.074,00		
5	03	02	1.03	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	207.103.000,00	183.407.400,00	183.407.400,00		
5	03	02	1.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	56.380.000,00	16.914.000,00	16.914.000,00		
5	03	02	1.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	112.300.000,00	17.900.000,00	17.900.000,00		
5	03	02	1.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	413.582.010,00	195.709.005,00	195.709.005,00		
5	03	02	1.03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	33.624.580,00	8.570.000,00	8.570.000,00		
5	3	2	1,04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2.144.727.087,00	1.139.112.758,00	1.139.112.758,00	Non Fixed Cost	
5	03	02	1.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	634.083.800,00	346.769.300,00	346.769.300,00		
5	03	02	1.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	1.022.172.550,00	631.276.265,00	631.276.265,00		
5	03	02	1.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	121.663.300,00	48.636.000,00	48.636.000,00		
5	03	02	1.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	334.536.729,00	102.709.550,00	102.709.550,00		
5	03	02	1.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	32.270.708,00	9.721.643,00	9.721.643,00		
TOTAL						73.300.845.933,00	66.254.500.375,00	69.156.097.590,00		



1E78DB25CA

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Tidak ada program dan kegiatan BKD yang diusulkan pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/kota untuk tahun anggaran 2025.



1E78DB25CA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1E78DB25CA>

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH BKD PROV JABAR

3.1 Program, Kegiatan BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat serta mengacu kepada rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2025, maka dirumuskan program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 adalah :

- 1) Program Kepegawaian Daerah
- 2) Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;

Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan Program dan Kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala BKD Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk ketercapaian IKU Pemerintah Daerah, Dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan BKD Provinsi Jawa Barat sampai dengan triwulan I Tahun 2025 serta memperhatikan Perubahan RKPD Tahun 2025 terdapat 2 Program, 15 Kegiatan, 38 Sub Kegiatan dengan Total Pagu Murni Total Rp.73.300.845.933,-menjadi Rp.69.156.097.590,- disajikan pada tabel terlampir Tabel 3.1.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1E78DB25CA>

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2025
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan			Rencana Perubahan Tahun 2025				Kategori Kegiatan (Fixed Cost/Non Fixed Cost)	Alasan / Argumentasi Perubahan
						Indikator		Target Capaian (Volume dan Satuan)	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/(Kurang)		
						Output	Outcome							
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	3				KEPEGAWAIAN					73.300.845.933,00	69.156.097.590,00	(4.144.748.343,00)		
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Kategori i		58.868.651.388,00	58.356.068.799,00	(512.582.589,00)	Fixed Cost	
5	3	1	1,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Disusun	100 Persen		467.648.250,00	170.338.475,00	(297.309.775,00)	Fixed Cost	
5	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		14 Dokumen	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	319.310.000,00	125.837.000,00	(193.473.000,00)		
5	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	148.338.250,00	44.501.475,00	(103.836.775,00)		



1E78DB25CA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1E78DB25CA>

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan			Rencana Perubahan Tahun 2025				Kategori Kegiatan (Fixed Cost/Non Fixed Cost)	Alasan / Argumentasi Perubahan
						Indikator		Target Capaian (Volume dan Satuan)	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/(Kurang)		
						Output	Outcome							
5	3	1	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah Persentase TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah	100 Persen		48.352.216.143,00	49.280.440.690,00	928.224.547,00	Fixed Cost	
5	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		140 Orang/ Bulan	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	48.114.032.674,00	49.147.380.690,00	1.033.348.016,00		
5	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKP dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuan Bulanan/Triwulanan/Semest SKPD		15 Laporan	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	238.183.469,00	133.060.000,00	(105.123.469,00)		
5	3	1	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah yang Disediakan	100 Persen		61.100.000,00	24.050.000,00	(37.050.000,00)	Fixed Cost	
5	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		25 Orang	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	61.100.000,00	24.050.000,00	(37.050.000,00)		



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan			Rencana Perubahan Tahun 2025				Kategori Kegiatan (Fixed Cost/Non Fixed Cost)	Alasan / Argumentasi Perubahan
						Indikator		Target Capaian (Volume dan Satuan)	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/(Kurang)		
						Output	Outcome							
5	3	1	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		1. Persentase Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang Berspesifikasi PDN2. Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang Terpenuhi 3. Persentase Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah4. Persentase Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah5. Pesentase Peningkatan Pengakses Media Informasi Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah	100 Persen		2.071.669.550,00	1.412.475.415,00	(659.194.135,00)	Fixed Cost	
5	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		20 Paket	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	403.222.050,00	334.543.021,00	(68.679.029,00)		
5	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	258.365.500,00	216.310.855,00	(42.054.645,00)		



1E78DB25CA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1E78DB25CA>

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan			Rencana Perubahan Tahun 2025				Kategori Kegiatan (Fixed Cost/Non Fixed Cost)	Alasan / Argumentasi Perubahan
						Indikator		Target Capaian (Volume dan Satuan)	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/(Kurang)		
						Output	Outcome							
5	0	0	1.0	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	350.000.000,00	245.000.000,00	(105.000.000,00)		
5	0	0	1.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	1.060.082.000,00	616.621.539,00	(443.460.461,00)		
5	3	1	1,0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Terpenuhi	100 Persen		846.408.530,00	662.189.553,00	(184.218.977,00)	Fixed Cost	
5	0	0	1.0	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		20 Unit	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	846.408.530,00	662.189.553,00	(184.218.977,00)		
5	3	1	1,0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Unit Kerja Yang Terpenuhi Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver dan Komunikasi Terpenuhi	100 Persen		5.219.815.856,00	5.196.215.855,00	(23.600.001,00)	Fixed Cost	
5	0	0	1.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	506.396.816,00	506.396.816,00	-		



1E78DB25CA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1E78DB25CA>

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan			Rencana Perubahan Tahun 2025				Kategori Kegiatan (Fixed Cost/Non Fixed Cost)	Alasan / Argumentasi Perubahan
						Indikator		Target Capaian (Volume dan Satuan)	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/(Kurang)		
						Output	Outcome							
5	0	0	1.0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	Kota Bandung, Bandung Wetan,Citarum	103.560.000,00	103.560.000,00	-		
5	0	0	1.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah		12 Laporan	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	4.609.859.040,00	4.586.259.039,00	(23.600.001,00)		
5	3	1	1,0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100 Persen		1.849.793.059,00	1.610.358.811,00	(239.434.248,00)	Fixed Cost	
5	0	0	1.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		15 Unit	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	768.490.000,00	668.580.000,00	(99.910.000,00)		
5	0	0	1.0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		12 Unit	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	1.081.303.059,00	941.778.811,00	(139.524.248,00)		



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Rencana Perubahan Tahun 2025				Kategori Kegiatan (Fixed Cost/Non Fixed Cost)	Alasan / Argumentasi Perubahan	
						Indikator		Target Capaian (Volume dan Satuan)	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)			Tambah/(Kurang)
						Output	Outcome							
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Nilai Kriteria Manajemen Kinerja dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin Nilai Kriteria Pengembangan Karier Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Perlindungan Dan Pelayanan; Dan Sistem Informasi Kepegawaian Nilai Kriteria Promosi dan Mutasi Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Disiplin Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi	120 Poin 120 Poin 117,5 Poin 40 Poin 4,9 Poin 27,5 Poin 12,5 Poin		14.432.194.545,00	10.800.028.791,00	(3.632.165.754,00)		



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan			Rencana Perubahan Tahun 2025				Kategori Kegiatan (Fixed Cost/Non Fixed Cost)	Alasan / Argumentasi Perubahan
						Indikator		Target Capaian (Volume dan Satuan)	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/(Kurang)		
						Output	Outcome							
5	3	2	1,01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Perlindungan dan Pelayanan; dan Sistem Informasi Kepegawaian	117.5 Poin		7.437.909.936,00	4.257.459.776,00	(3.180.450.160,00)	Non Fixed Cost	
5	03	02	1.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		1 Dokumen	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	3.501.280.000,00	1.309.034.000,00	(2.192.246.000,00)		
5	03	02	1.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		4 Dokumen	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	347.945.725,00	145.594.000,00	(202.351.725,00)		
5	03	02	1.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi		3 Lembaga	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	316.624.211,00	145.776.776,00	(170.847.435,00)		
5	03	02	1.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		1 Dokumen	Kota Bandung, Bandung Wetan,Citarum	3.211.680.000,00	2.638.155.000,00	(573.525.000,00)		
5	03	02	1.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian		1 Dokumen	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	60.380.000,00	18.900.000,00	(41.480.000,00)		
5	3	2	1,02		Mutasi dan Promosi ASN		Nilai Kriteria Promosi dan Mutasi	40 Poin		1.459.126.052,00	710.683.768,00	(748.442.284,00)	Non Fixed Cost	



1E78DB25CA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1E78DB25CA>

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Rencana Perubahan Tahun 2025				Kategori Kegiatan (Fixed Cost/Non Fixed Cost)	Alasan / Argumentasi Perubahan	
						Indikator		Target Capaian (Volume dan Satuan)	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)			Tambah/(Kurang)
						Output	Outcome							
5	0	0	1.0	0	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah		1 Dokumen	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	483.074.020,00	240.278.412,00	(242.795.608,00)		
5	0	0	1.0	0	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		8 Laporan	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	461.482.032,00	241.654.356,00	(219.827.676,00)		
5	0	0	1.0	0	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		6 Dokumen	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	514.570.000,00	228.751.000,00	(285.819.000,00)		
5	3	2	1,03		Pengembangan Kompetensi ASN		Nilai Kriteria Pengembangan Karier	120 Poin		3.390.431.470,00	4.692.772.489,00	1.302.341.019,00	Non Fixed Cost	
5	0	0	1.0	0	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center		11 Dokumen	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	512.815.400,00	221.515.000,00	(291.300.400,00)		
5	0	0	1.0	0	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola		4 Dokumen	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	1.636.062.000,00	3.748.675.740,00	2.112.613.740,00		Keurangan Beasiswa S2 MTI (ITB Lanjutan)
5	0	0	1.0	0	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat		4 Dokumen	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	117.120.000,00	47.774.000,00	(69.346.000,00)		
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital														



1E78DB25CA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1E78DB25CA>

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Rencana Perubahan Tahun 2025				Kategori Kegiatan (Fixed Cost/Non Fixed Cost)	Alasan / Argumentasi Perubahan	
						Indikator		Target Capaian (Volume dan Satuan)	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)			Tambah/(Kurang)
						Output	Outcome							
5	0	0	1.0	0	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN		100 Orang	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	177.450.900,00	151.359.270,00	(26.091.630,00)		
5	0	0	1.0	0	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional		6 Dokumen	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	123.993.580,00	100.948.074,00	(23.045.506,00)		
5	0	0	1.0	1	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN		50 Orang	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	207.103.000,00	183.407.400,00	(23.695.600,00)		
5	0	0	1.0	1	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN		2 Laporan		56.380.000,00	16.914.000,00	(39.466.000,00)		
5	0	0	1.0	1	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina		20000 Orang		112.300.000,00	17.900.000,00	(94.400.000,00)		
5	0	0	1.0	1	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		8 Dokumen	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	413.582.010,00	195.709.005,00	(217.873.005,00)		
5	0	0	1.0	1	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional		2 Laporan		33.624.580,00	8.570.000,00	(25.054.580,00)		
5	3	2	1,0		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Nilai Kriteria Manajemen Kinerja dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	120 Poin		2.144.727.087,00	1.139.112.758,00	(1.005.614.329,00)	Non Fixed Cost	



1E78DB25CA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1E78DB25CA>

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan			Rencana Perubahan Tahun 2025				Kategori Kegiatan (Fixed Cost/Non Fixed Cost)	Alasan / Argumentasi Perubahan
						Indikator		Target Capaian (Volume dan Satuan)	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/(Kurang)		
						Output	Outcome							
5	0	0	1.0	0	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		8 Dokumen	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	634.083.800,00	346.769.300,00	(287.314.500,00)		
5	0	0	1.0	0	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		15 Orang	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	1.022.172.550,00	631.276.265,00	(390.896.285,00)		
5	0	0	1.0	0	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa		500 Orang	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	121.663.300,00	48.636.000,00	(73.027.300,00)		
5	0	0	1.0	0	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		500 Orang	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	334.536.729,00	102.709.550,00	(231.827.179,00)		
5	0	0	1.0	0	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani		10 Dokumen	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	32.270.708,00	9.721.643,00	(22.549.065,00)		
TOTAL										73.300.845.933,00	69.156.097.590,00	(4.144.748.343,00)		



1E78DB25CA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1E78DB25CA>

Berdasarkan tabel 3.1 Jika dilihat dari penyerapan anggaran tahun 2025 telah mencapai 16.68 % dari pagu anggaran sebesar Rp.73.300.845.933,- dengan sisa anggaran Rp.69.156.097.590,- Terserap Rp. 4.144.748.343,- Adapun rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program yang dicapai untuk Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I adalah “Sangat Rendah”.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah diuraikan sebelumnya disusun berdasarkan pendekatan kinerja dalam rangka pencapaian target kinerja yang tertuang dalam IKU Gubernur dan IKU Perangkat Daerah. Adapun lebih jelasnya keterkaitan kinerja antara program dan kegiatan tersebut dapat dilihat dalam lampiran Rencana Program Kerja, Indikator dan Target dalam Rencana Kerja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

3.2 Sinkronisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Dari program dan kegiatan yang telah disebutkan sebelumnya, BKD Provinsi Jawa Barat sendiri tidak lepas kerjasamanya dengan perangkat daerah lain dalam mewujudkan target kinerjanya. Utamanya karena implementasi Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang berpengaruh terhadap susunan OPD, susunan pejabat struktural dan susunan tupoksi masing-masing perangkat daerah. Lebih lanjut lagi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya BKD Provinsi Jawa Barat perlu mengkaji nomenklatur dan formasi akan jabatan fungsional tertentu yang sehubungan SOTK baru dalam lingkup Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Menteri PAN-RB No. 25 tahun 2016 tentang Nomenklatur bagi Jabatan Pelaksana mendapatkan penyesuaian baik secara nomenklatur maupun formasi.

BKD sebagai *leading sector* dalam penentuan Jabatan bagi masing-masing individu yang bertugas dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus betul-betul *realible* dan *sustainable*. Artinya yang sesuai dengan kenyataan (dapat dipertanggungjawabkan) dan berkelanjutan. Selain itu, perubahan dalam pengelolaan ASN yang semakin dinamis dijawab dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 mengenai Manajemen ASN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1E78DB25CA>

menuju perubahan yang cepat dan tanggap dari para seluruh aparatur khususnya lingkup Provinsi Jawa Barat.

Selain itu beberapa catatan yang menjadi fokus perhatian dalam pelaksanaan kegiatan BKD pada tahun anggaran 2025 melibatkan beberapa perangkat daerah sebagai rekan kerjasama dalam upaya mewujudkan indikator sasaran yang sama dalam RPD 2024-2026, diantaranya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat, kaitannya dengan penyelenggaraan berbagai diklat teknis maupun fungsional serta diklat kepemimpinan. Selain itu, BKD juga tidak terlepas kerjasamanya dengan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam kaitannya dengan pelaksanaan analisis jabatan (ANJAB) dan analisis beban kerja (ABK), pemantapan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta penetapan besaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).

BKD juga merupakan *leader* untuk beberapa kegiatan penting yang melibatkan seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, diantaranya kegiatan pengukuran kinerja pegawai yang kemudian diaplikasikan dalam suatu sistem sasaran kerja pegawai yang telah terintegrasi secara *online*. Dalam hal ini setiap pegawai bertanggungjawab untuk menginput realisasi dari target sasaran kerja yang telah ditetapkan pada awal tahun berjalan. Tahap akhir dari proses penilaian kinerja tersebut ada di BKD selaku verifikator kinerja dari masing-masing pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dalam pelaksanaannya, masing-masing perangkat daerah memiliki peranan penting untuk selalu mendorong para pegawainya menginput realisasi kinerja tepat waktu. Ditambah lagi dengan adanya beban tenaga pendidik dan kependidikan yang sejauh ini sudah mulai melaksanakan tugasnya sebagai pegawai lingkup Provinsi Jawa Barat yang artinya penilaian kinerja dan permasalahan kesejahteraan sudah sepenuhnya di tanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

BKD memiliki tanggungjawab besar dalam mewujudkan target yang telah ditetapkan pada tahun 2026. BKD dalam kegiatan Pengembangan Sumber



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1E78DB25CA>

memotivasi para ASN untuk tetap semangat dalam meraih beasiswa jenjang S3 ke luar negeri.



1E78DB25CA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1E78DB25CA>

BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 merupakan perencanaan kerja untuk periode Tahun 2025. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan merupakan penjabaran dari Renstra BKD Tahun 2024-2026 dengan mempedomani isu-isu penting tahun berjalan. Serta sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan Program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

Sebagai Pedoman Kerja, pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2025 ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Seluruh ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat wajib melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Anggaran Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Tahun 2025 mengacu kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
3. Pelaksanaan DPA Tahun 2025 akan di Monitoring dan Evaluasi setiap bulan dan di Laporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan;
4. Pada Akhir Tahun 2025 pelaksanaan Program dan Kegiatan akan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2025 akan di evaluasi sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026.

Selanjutnya, Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 akan di jabarkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2025.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1E78DB25CA>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



1E78DB25CA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1E78DB25CA>